PEMIKIRAN POLITIK SUTAN SJAHRIR TENTANG REVOLUSI

Eko Maulana

Universitas KH. Wahab Hasbullah Jombang
lana.eko21@gmail.com

Abstract

The article describes SutanSjahrir's struggle for the state and Indonesian people. Sjahrir's struggle was grounded on democratic revolution and national revolution. The writer has formulated two main questions, are; *first,* how is the revolution of political parties wished by Sjahrir? *Second,* how did Sjahrir implement his idea about governmental revolution? The results of the study show that after Indonesianindependence, Sjahrir promulgated what so-called revolution of the political parties. To Sjahrir, the political parties should be in form of the cadres' parties, not the masses parties. Furthermore, when dealing with the Indonesian governmental system, he contended governmental revolution. In this phase, Sjahrir stressed the importance of functioning of the civil service, police, and agrarian officers. He also called on the empowerment of workers and peasants through political education as democratic revolutionary forces.

Keywords: Revolution, national, political parties, government

Abstrak

Artikel yang berbasis pada penelitian historis ini menjelaskan perjuangan Sutan Sjahrir untuk rakyat dan negara Indonesia. Perjuangan Sutan Sjahrir berpijak pada revolusi kerakyatan dan revolusi nasional. Rumusan masalahnya adalah; *pertama,* bagaimana revolusi partai politik yang diinginkan Sjahrir? *kedua,* bagaimana revolusi pemerintahan ala Sjahrir? Hasil penelitian menunjukkan setelah Indonesia merdeka, Sjahrir menginginkan adanya revolusi dalam partai politik. Bagi Sjahrir, partai politik sebaiknya berbentuk partai kader dan bukan partai massa. Selanjutnya, ketika masuk dalam sistem pemerintahan Indonesia, ia menginginkan adanya revolusi pemerintahan. Dalam fase ini, Sjahrir menandaskan pentingnya memfungsikan pamong praja, polisi dan petugas agraria. Ia juga menyerukan buruh dan petani untuk diperkuat melalui pendidikan politik sebagai kekuatan revolusioner yang demokratis.

Kata Kunci: Revolusi, nasional, partai politik, pemerintahan

Pendahuluan

Soetan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Ia adalah putra dari Moh. Rasad Gelar Maha Raja Soetan yang menjabat sebagai *Hoofd* atau jaksa pada *Landraad* di Medan. Ibunya, Poetri Siti Rabiah yang berasal dari Natal, daerah Tapanuli Selatan. Ibunya berasal dari keluarga raja-raja lokal swapraja (Anwar, 2010:1). Sjahrir mengenyam sekolah dasar (*Eurapes Lagerere School*) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan, dan membetahkannya bergaul dengan berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda (Mrazek,1996: 35). Malamnya dia mengamen di Hotel *de Boer*, hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih (Mrazek,1996: 39).

Sjahrir menyelesaikan sekolah menengahnya di MULO pada tahun 1926, kemudian ia melanjutkan sekolah lanjutan atas di *Algemene MiddlebareSchool* di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu (Mrazek,1996: 52). Sjahrir sebagai seorang pelajar telah menunjukkan sifat kritisnya dengan lebih mengutamakan pengertian daripada sekedar menghapalkan pelajaran. Sifat-sifat ini terutama menonjol pada mata pelajaran sejarah dan bahasa latin. Sjahrir tidak hanya mempelajari bahasa latin saja, tetapi mengajukan pertanyaan tentang filsafat dan sejarah Kerajaan Romawi. Perhatiannya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia timbul dengan adanya pemberontakan PKI dan sejarah perkembangan masyarakat, Negara dalam sejarah kemanusiaan.

Di kalangan siswa sekolah menengah *Algemerre Middlebare School* (AMS) Bandung, Sjahrir tidak hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Sjahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dengan mendirikan perguruan nasional "*Tjahja Volksuniversiteit*" di Bandung (Mrazek,1996: 67). Selain itu Sjahrir menjadi seorang bintang di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil pentas itu dia gunakan untuk

membiayai sekolah yang ia dirikan “*Tjahja Volksuniversiteit*”, Cahaya Universitas Rakyat (Anwar, 2010: xii).

Aksi sosial Sjahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada 20 Februari 1927, Sjahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, *Jong Indonesie* (Mrazek,1996: 64). Perhimpunan itu kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928 (Hamdani, tt 73).

Di Bandung Sjahrir muda sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di *Algemene Middlebare School* (AMS), Sjahrir kerap lari dikejar polisi karena bandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926, Koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Setelah tamat dari (AMS) tahun 1929 Sjahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Leiden di Amsterdam (Mrazek,1996: 92).

RagamRevolusi Menurut Sjahrir

Untuk mengisi kemerdekaan, adanya semangat rakyat Indonesia yang menyala-nyala bagi Soetan Sjahrir merupakan hal yang penting, tetapi perlu disertai dengan pengertian terhadap perjuangan pengisian kemerdekaan. Tanpa adanya pengertian mengenai dasar dan tujuan perjuangan, akan muncul kebimbangan-kebimbangan dan akibatnya akan mudah terpengaruh pada hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab. Kondisi seperti ini malahan menjadi hambatan bagi perjuangan pengisian kemerdekaan Indonesia.

Bagi Sjahrir, peristiwa itu satu contoh bahwa Indonesia masih lemah sebagai negara yang baru merdeka. Setelah kekuasaan tiga setengah tahun Jepang berakhir, Indonesia disergap kerusuhan dan kekacauan. Laskar-laskar pemuda

menyerang tentara sekutu, toko-toko diserbu dan dirampok, pembunuhan terhadap warga Tionghoa, Indo, Ambon, dan Manado terjadi di mana-mana (Mrazek,1996: 503).

Dengan penuh gelora dan kritik tajam, Sjahrir melukiskan situasi Indonesia di awal kemerdekaan itu pada bagian pertama *Perdjoeangan* kita. Dengan jernih Sjahrir menunjukkan bahwa kerusuhan, pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang akan menimbulkan kekuatan fasis baru dari dalam negeri sendiri. Sjahrir berpendapat bahwa revolusi nasional harus segera disusul oleh suatu revolusi sosial yang dapat membebaskan rakyat dari kungkungan feodalisme lama dan dari jebakan-jebakan ke arah fasisme yang muncul bersama kapitalisme yang tak terkendali. Seterusnya, kemerdekaan nasional bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik, tetapi menjadi jalan bagi rakyat untuk merealisasikan diri dan bakat-bakatnya dalam kebebasan tanpa halangan dan hambatan. Karena itulah nasionalisme harus tunduk kepada kepentingan demokrasi, dan bukan sebaliknya, karena tanpa demokrasi maka nasionalisme dapat bersekutu kembali dengan feodalisme lama yang hanya memerlukan beberapa langkah berikut untuk tiba pada fasisme. Itu terlihat dalam tulisannya,

> “Keluar, revolusi kita menampakkan diri sebagai revolusi nasional; ke dalam, revolusi kita sesuai dengan hukum-hukum demokrasi masyarakat, punya serat-serat sosialis. Jika kita tidak sadar mendalami kenyataan itu, maka apa yang pada saat ini kita perjuangkan, hanyalah tetap tinggal revolusi nasional belaka, penuh pengertian palsu terhadap perubahan-perubahan sosial yang sekarang sedang bekerja dan melaksanakan diri dalam masyarakat kita yang demokratis. Maka ada bahaya besar, kita lalu tidak mengenal kembali salah satu musuh kita yang mengambil bentuk yang cocok dengan bentuk-bentuk tertentu dari nasionalisme; sehingga nasionalisme kita lalu mendapat raut-raut muka dari sebentuk solidarisme, jelasnya solidarisme feudal atau hirarkis. Dengan kata lain: fasisme, musuh terbesar dari kemajuan bangsa di bumi ini.” (Abdullah, 1978: 89)

Ia juga mengkritik pekik "merdeka" hanya simbol kosong dari euphoria kebebasan. Proklamasi 17 Agustus 1945 menurutnya hanya sebagai peluang awal menyusun kekuasaan tapi tak dipakai oleh para pemimpin dikarenakan mereka oleh Sjahrir disebut sebagai orang-orang yang terbiasa tunduk kepada Jepang dan Belanda. Ia tidak hadir pada saat Soekarno Hatta membacakan pernyataan Indonesia merdeka itu.

Bagi Sjahrir, kekuatan itu harus dimulai dengan "revolusi kerakyatan", revolusi yang dipimpin oleh golongan yang demokratis, bukan oleh golongan nasionalistis yang membudak kepada fasisme lain. Kalau dalam negeri harus tunduk pada tuntutan demokrasi, maka dalam hubungan internasional, nasionalisme harus tunduk kepada humanisme dan juga internasionalisme, karena jika tidak maka nasionalisme itu akan menjadi sumber perselisihan baru di antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Karena jika begitu, maka fasisme dalam negeri hanyalah wajah lain dari chauvinisme dalam pergaulan antar bangsa.

1. Revolusi Kerakyatan

Revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan. Meskipun kita telah berpuluh tahun berada di dalam lalu lintas dunia modern, meskipun masyarakat negeri kita telah sangat dirubah dan dipengaruhi olehnya, akan tetapi di seluruh kehidupan rakyat kita terutama di desa, alam kehidupan serta fikiran orang miskin feodal. Penjajahan Belanda berpegang pada segala sisa-sisa feodalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sjahrir sangat khawatir dengan munculnya feodalisme lama yang seakan proklamasi memberi peluang kepada para pemimpin politik untuk menjadi raja-raja baru yang akan membelenggu rakyat kembali kepada penderitaan dan keterbelakangan. Karena itu selain revolusi nasional diperlukan juga suatu revolusi sosial yang dinamakannya dengan revolusi kerakyatan.

Kolonialisme Belanda menurut Sjahrir, telah mengawinkan rasio modern dari Barat dengan feodalisme lokal dengan sangat cerdik, dan hasilnya adalah semacam fasisme terselubung, yang menyiapkan lahan subur untuk fasisme Jepang. Dalam pandangannya fasisme lokal mudah sekali dipengaruhi oleh setiap kecenderungan totaliter, karena massa rakyat yang tidak memiliki pengertian politik dan keyakinan akan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin politik yang kharismatik dengan menggunakan slogan-slogan, dan mobilisasi massa. Bagi Sjahrir, feodalisme dan totaliarisme memiliki kesamaan watak dalam mengambil kebebasan se-seorang yang akan menjadikannya sebagai objek dari ke-kuasaan tersebut.

Intisari dari setiap kemerdekaan sebuah bangsa menurut Sjahrir adalah terciptanya kebebasan bagi setiap orang, dimana setiap individu dapat dengan bebas menggunakan segala potensi dalam dirinya dalam mengapresiasi akal pikirannya yang sehat, untuk menentukan kehidupannya masing-masing tanpa dibatasi oleh paksaan dan tekanan dari pihak lain baik secara paksa maupun dengan intimidasi dari penguasa politik. Kebebasan menurut Sjahrir bukan sekedar kebebasan politik semata, akan tetapi lebih dari itu merupakan kebebasan jiwa yang memandang dunia sebagai tempat yang luas untuk mereka berkembang dari prasangka dan curiga.

2. Revolusi Nasional

Dalam masa kemerdekaan, perjuangan menentang feo-dalisme dan membebaskan diri dari belenggu kapitalisme, revolusi nasional harus diutamakan. Untuk menciptakan re-volusi nasional, revolusi demokrasi adalah hal yang harus dilakukan, yang akan mengubah pola pikir rakyat menjadi lebih maju. Menjadikan demokrasi sebagai yang utama, dan bukan nasionalisme. Rakyat juga harus menghargai bangsa lain, tidak harus membencinya atau memusuhi mereka, dan berfikir bahwa kita adalah bagian dari dunia internasional yang terdiri dari manusia-manusia yang berbeda, yang men-

jadikan kita masyarakat yang lebih humanis. Untuk mencapai hal tersebut, maka yang diperlukan adalah revolusi nasional yang dipimpin oleh para pemimpin demokratis yang revolusioner, dan jangan sampai dipimpin oleh pemimpin yang mengagungkan nasionalisme ataupun para ultranasionalis yang akan menjadi fasisme yang merugikan hakekat kemerdekaan itu sendiri.

Asas-asas pemikiran nasionalisme Sjahrir menempatkan dirinya dalam suatu filsafat dan sosial yang lebih luas. Menurut Sjahrir kemerdekaan bukan hanya sekedar membebaskan diri dari kekuasaan asing, melainkan berkaitan dengan wawasan-wawasan tentang kebebasan individu dan perubahan sosial yang menjadikan sebuah kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan yang sejati. Cita-citanya ini yang mempengaruhi jalan pikiran Sjahrir pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dimana ia menuntut agar deklarasi kemerdekaan disusun dalam istilah-istilah yang anti fasis dan bukan hanya dengan istilah nasionalisme saja.

Negara Republik Indonesia yang dijadikan alat dalam revolusi rakyat, harus dijadikan alat perjuangan demokratis, dibersihkan dari sisa-sisa Jepang dan fasismenya. Undang-Undang dasar yang belum sempurna harus diganti dengan Undang-Undang dasar yang demokratis, yang menetapkan hak-hak pokok rakyat, yaitu kemerdekaan berfikir, berbicara, beragama, menulis, mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, turut membentuk dan menetukan susunan dan urusan negara dengan hak memilih dan dipilih untuk segala badan yang mengurus negara.

3. Revolusi dan Partai

Perkembangan yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan agaknya begitu cepat ketika Sjahrir mulai menduduki jabatan politis di dalam pemerintahan sebagai anggota KNIP. Setelah pada pertengahan Oktober merubah status KNIP yang semula hanya sebagai penasihat Presiden Soekarno, menjadi sebuah badan yang diberi kekuasaan legislatif. Dalam perkembangan

selanjutnya Sjahrir yang ketika itu sudah menjabat sebagai ketua KNIP, mengijinkan atas pendirian partai-partai politik. Partai politik sebaiknya berbentuk partai kader dan bukan partai massa, dimana partai kader yang anggotanya memiliki kemampuan dan pengetahuan politik dapat ikut serta dalam tanggung jawab maupun kebijakan-kebijakan partai, sedangkan dalam partai massa, keputusan politik diberikan langsung sepenuhnya kepada pemimpin politik, dan massa hanya tinggal mengikuti saja dan di gerakkan oleh pemimpin partai. Bersama bung Hatta, Sjahrir juga ikut mendorong berkembangnya sistem multi partai, untuk menghindari situasi politik yang memusatkan kekuasaan yang terlalu besar kepada suatu golongan maupun pada diri satu orang.

Menurut Sjahrir untuk menciptakan revolusi dengan tepat dan teratur, dalam suatu negara haruslah ada suatu partai yang revolusioner yang akan memimpin revolusi, yaitu mengurus segala kepentingan masyarakat yang akan diperjuangkan, menetapkan strategi dan taktik perjuangan. Untuk itu ia mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer, sebagaimana keyakinannya dalam pamfletnya bahwa kedaulatan harus ada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum berasal dari partai politik. Partai-partai politik harus dibentuk oleh mereka yang terdidik, berdisiplin, dan berpengetahuan modern untuk membawa rakyat ke dalam revolusi.

Dengan adanya partai politik, masyarakat akan mampu mengekspresikan wujud aspirasi politik mereka melalui partai, sesuai dengan Maklumat Pemerintah 3 November 1945, rakyat dibebaskan mendirikan dan mengikuti partai politik yang disukainya (Mangandaralam, 1987: 48).

4. Revolusi dan Pemerintahan

Dalam tulisannya, Sjahrir menjelaskan sedikit teknis tentang menyusun alat-alat pemerintahan, bagaimana memfungsikan pamong praja, polisi dan petugas agraria. Ia

juga menyerukan buruh dan petani untuk diperkuat melalui pendidikan politik sebagai kekuatan revolusioner yang demokratis. Pemilihan-pemilihan harus dimulai dari desa, sementara pemuda harus menyokong buruh dan petani, dan bukan mendukung pemimpin revolusi (Abdullah, 1994: 90).

Menurut Sjahrir, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan merubah keadaan adalah memperjelas kedudukan Negara Republik Indonesia yaitu pada sektor pemerintahan. Secepat mungkin harus ada demokratisasi pemerintahan sehingga rakyat menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Hal ini akan lebih mudah dikerjakan jika adanya dewan perwakilan rakyat dari desa hingga puncak pemerintahan (Mrazek,1996: 494). Dengan terbentuknya alat pemerintahan yang baru, maka diharapkan kekacauan yang terjadi di masyarakat akan hilang dengan sendirinya, hingga pada akhirnya masyarakat akan mendukung pemerintahan, sehingga kesempatan ini akan digunakan pemerintah untuk dijadikan alat dalam menjalankan revolusi demokrasi.

Ia juga menulis tentang posisi politik luar negeri Indonesia yang seharusnya dilakukan setelah merdeka. Menurut Sjahrir, kemerdekaan itu harus dicapai secara bertahap, tidak tergesa-gesa, dan mengutamakan kehendak tanpa memikirkan strategi serta peran yang harus diambil dalam melaksanakan proses untuk mencapai kemerdekaan.

Kemerdekaan harus dicapai dengan cara yang elegan, dengan cara-cara yang mengutamakan kemanusiaan, diplomasi, dan tidak dengan perang yang dipengaruhi oleh amarah. Untuk itu dalam setiap kebijakannya dalam mencapai kemerdekaan, ia selalu mengutamakan jalan-jalan dialog dan diplomasi dengan Belanda ataupun dengan sekutu untuk meraih simpati dunia dalam mendukung tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Sjahrir juga menyinggung tentang pemuda Indonesia yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa. Ia menganggap bahwa pemuda adalah faktor penting dalam semangat ke-

merdekaan, dan semangat kebangsaan. Namun, pemuda bukanlah satu-satunya faktor yang dapat melaksanakan perjuangan kebangsaan ke arah Indonesia yang berlandaskan kerakyatan. Menurutnya, pemuda haruslah bekerja sama dengan segenap elemen bangsa yang lain, seperti dengan kaum buruh, kaum petani, kaum terpelajar dan elemen bangsa lainnya yang mewakili setiap sendi bangsa Indonesia, tidak bisa hanya diserahkan kepada generasi muda saja, tetapi harus bekerja sama dengan setiap elemen bangsa, untuk mencapai perjuangan bangsa. Untuk mencapai tujuan perjuangan bangsa itu, rakyat haruslah bersatu, dan juga menurutnya di butuhkan partai yang revolusioner untuk memimpin perjuangan dan bukan bertumpu pada pemuda saja (Abdullah, 1994: 92).

5. Revolusi dan Indonesia Kekinian

Tujuan NKRI ini didirikan, yang secara resmi dicantumkan dalam konstitusi negara sebagai kontrak sosial institusi negara dengan seluruh entitas bangsa, adalah untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap rakyatnya, memajukan kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat negerinya. Dalam konteks Indonesia kekinian, hal itu masih jauh terlaksana dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Perjuangan Sjahrir yang menginginkan sebuah demokrasi yang berasaskan kerakyatan belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia tercinta ini.

Seiring dengan gelombang demokratisasi, suatu negara memang relatif mudah mengalami transisi menuju demokrasi. Akan tetapi, dalam perjalanannya hal semacam itu tidak serta merta mempunyai makna bahwa negara itu akan terus berada dalam kerangka demokrasi. Ketika negara tersebut gagal dalam menjalankan konsolidasi demokrasi, bisa saja akan tergelincir kembali ke sistem yang otoriter. Karena itu, semua negara yang berproses menuju demokrasi, begitupun Indonesia, selalu menghadapi masalah dalam penerapannya.

Masalah sosial seperti pendidikan yang tidak merata, kemiskinan, dan sempitnya lapangan pekerjaan merupakan PR besar yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan di negara kita ini. Rakyat yang selayaknya menjadi aktor utama dalam sistem demokrasi hanya terlihat di saat momentum-momentum tertentu saja. Hal ini yang jauh dari apa yang di cita-citakan Sjahrir dengan pemahaman kerakyatannya.

Hal yang juga masih belum terselesaikan sampai saat ini mengenai pemahaman nasionalisme yang menurut Sjahrir pemahaman nasionalisme harus diiringi dengan pemahaman sistem demokrasi. Dimana kita juga harus menghargai bangsa orang lain, selain bangsa kita sendiri. Sedangkan yang terjadi saat ini berbanding berbalik dengan pemahaman Sjahrir. Dibukanya sistem pasar bebas yang dilakukan pemerintah malah semakin mengurangi rasa cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Tujuan dari diberlakukannya sistem ini pada mulanya baik, hanya untuk menambah daya saing produk dalam negeri kita sendiri agar bisa lebih berkembang. Akan tetapi, pengelolaan yang kurang baik dari pemerintah menjadikan produk-produk dalam negeri kita tergerus oleh produk luar negeri. Dalam hal ini seharusnya pemerintah juga ikut ambil peran dalam pengembangan-pengembangan usaha kecil menengah dengan memberikan akses yang mudah dalam peminjaman modal.

Dalam pemikirannya, Sjahrir juga menyinggung tentang partai politik. Menurut Sjahrir, partai politik bertujuan sebagai alat untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi negeri ini. Sedangkan yang terjadi saat ini partai politik hanya sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Tanpa harus menghiraukan rakyat yang sudah mendukungnya ketika keinginannya terwujud. Tidak transparannya masalah keuangan partai juga menjadikan partai politik sebagai lumbung korupsi tersubur yang terjadi di negeri kita ini.

Pemikiran Sjahrir yang terakhir mengenai sistem pemerintahan, dimana Sjahrir menginginkan agar di ben-

tuknya dewan perwakilan rakyat dari desa hingga puncak pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga proses demokrasi tersebut akan mudah dijalankan. Dalam penerapannya, kebijakan seperti ini hanya akan memunculkan raja-raja baru di daerah. Pendidikan politik yang masih belum rampung dilaksanakan pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah itu tidak berjalan dengan selayaknya. Lembaga-lembaga tersebut dalam prakteknya juga tidak lepas dari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Jika lembaga yang melakukan fungsi kontrol di daerah sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, lalu apa yang bisa diharapkan lagi?

Hal semacam itu seharusnya bisa diminimalisir jika antara wakil rakyat dan rakyat terdapat hubungan yang baik dan rasional. Di antara keduanya harus bisa ditumbuhkan rasa saling membutuhkan. Jika para politisi yang mempunyai kursi di parlemen membutuhkan dukungan dari masyarakat, sedangkan rakyat membutuhkan para politisi itu sebagai penyalur aspirasinya ke pusat pemerintahan. Dengan itu kontrol terhadap pemerintah yang berjalan akan mudah dilakukan.

Daftar Rujukan

Abdullah Taufik. 1978. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah.* Jakarta: LP3ES,.

.... 1994. *Manusia dalam Kemelut Sejarah.* Jakarta: LP3ES.

Anwar, Rosihan. 2010. *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan.* Jakarta:Kompas Gramedia.

Hamdani. *Sutan Sjahrir di Masa Mudanya*. Tt, tp.

Mrazek, Rudolf. 1996. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia.*Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Mangandaralam, Syahbuddin. 1987. *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir.* Jakarta: Rosda Jaya Putra.